Nama : Anggi Nurfirdausy Putri

Npm : 2052011019

Mata kuliah : Pendidikan bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd, M.Pd

Tugas Artikel

DAMPAK NEGATIF DARI KORUPSI PEMERINTAHAN DAERAH DI LAMPUNG

Abstrak

Korupsi di indonesia menyebar ke daerah secara perlahan, upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi telah di lakukan dengan membentuk perundang-undangan dan struktur kelembagaan baru,namun korupsi masih terjadi khususnya di daerah, artikel ini akan membahas tentang dampak negatif dari korupsi di pemerintahan daerah tepatnya di Lampung

A. Pendahuluan

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi

Dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

B. Pembahasan

 Dari kasus korupsi dampak negatif dari pemerintahan daerah di Lampung,

1.Dampak Terhadap ekonomi

Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi, sekita 30-40 persen dana menguap karena korupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan, Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi.yang berimbas kemahalan barang dan jasa di lampung.

2.Dampak terhadap kerusakan Lingkungan

Dampak dari korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan, akibat yag di hasilkan pleh peruskan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal loging saja di sinyalir kerugian Negara yang terjadi samapi 30-42 triliun rupiah pertahun

3.Dampak terhadap pertahan dan keamanan

Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran hankam Menguap sia sia,

4.Dampak terhadap social dan kemiskinan

Praktik Korupsi sangat amat membebankan pelaku ekonomi, karena dari korupsi tersebut berimbas pada mahalnya barag barang dan jasa, yang mengakibatkan para manusia dengan keuangan menengah kebawah kelelahan akibat praktik korupsi tersebut, banyaknya kerugian yang menimpa pelaku ekonomi

Berikut adalah salah satu contoh korupsi oleh Kepala daerah

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara menjadi nama terakhir dari kepala daerah Lampung yang terjerat kasus korupsi. Meski statusnya belum ditentutakan KPK, Agung bersama tiga orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10/2019). Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 600 juta. "Total uang yang diamankan sekitar Rp 600 juta. Diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2019). OTT yang menyeret bupati Lampung Utara itu diduga terkait dengan urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara. Dalam perkembangannya, total ada tujuh orang hingga hari ini. Selain bupati, pihak yang diamankan KPK merupakan pejabat pemerintahan setingkat kepala dinas dan kepala seksi, perantara, dan pihak swasta.

C. Simpulan

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa korupsi di daerah Provinsi Lampung sangat amat merugikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di daerah daaerahnya, marilah kita sebagai penerus bangsa harus berjanji agar selalu menaati peraturan peraturan pemerintahan agar Indonesia menjadi Negara yang maju dan berdaulat.

Selain itu kita sebagai Warga Negara Indonesia yang berdaulat haruslah kita melakukan pencegahan terhadap korupsi, agar tidak ada lagi kesenjangan sosial antara kalangan menengah kebawah dan kalangan menengah ke atas.

Daftar Pustaka

http://rri.co.id/bandar-lampung/post/berita/576918/kota\_bandar\_lampung/strategi\_pemberantasan\_korupsi\_meliputi\_tiga\_hal.html